SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH *E-MONEY*, NILAI TUKAR DAN SUKU BUNGA ACUAN TERHADAP INFLASI DI INDONESIA

MONICA CHRISTIANI

DEPARTEMEN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH *E-MONEY*, NILAI TUKAR DAN SUKU BUNGA ACUAN TERHADAP INFLASI DI INDONESIA

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi

MONICA CHRISTIANI
A11116511

Kepada

DEPARTEMEN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH *E-MONEY*, NILAI TUKAR DAN SUKU BUNGA ACUAN TERHADAP INFLASI DI INDONESIA

disusun dan diajukan oleh:

MONICA CHRISTIANI

A11116511

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 31 Agustus 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA.	M. Agung Ady Mangilep, SE., MSi.
NIP.19600516 199003 1 001	NIP.19740315 200312 1 002

Ketua Departemen Ekonomi Pembangunan
Fakutas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si
NIP.19690413 199403 1 003

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH *E-MONEY*, NILAI TUKAR DAN SUKU BUNGA ACUAN TERHADAP INFLASI DI INDONESIA

disusun dan diajukan oleh:

MONICA CHRISTIANI

A11116511

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **31 Agustus 2020**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA.	Anggota	1.....
2	M. Agung Ady Mangilep, SE., MSi.	Anggota	2.....
3	Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA. Ph.D.	Anggota	3.....
4	Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si.	Anggota	4.....

Ketua Departemen Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si.
NIP 19690413 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Monica Christiani

NIM : A11116511

Jurusan/Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

ANALISIS PENGARUH *E-MONEY*, NILAI TUKAR DAN SUKU BUNGA ACUAN TERHADAP INFLASI DI INDONESIA

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 31 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,

Monica Christiani

PRAKATA

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Adapun judul skripsi sebagai berikut: Analisis Pengaruh *E-Money*, Nilai Tukar dan Suku Bunga Acuan Terhadap Inflasi di Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Dengan tersusunnya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua, **Bapak Atak Unggul dan Ibu Serty Parimmin** yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi dan dukungan lahir maupun batin serta doa yang tiada henti kepada penulis. Serta pihak-pihak yang memberikan dukungan kepada penulis diantaranya yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Ketua Departemen Ekonomi Pembangunan Bapak Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si. dan Ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, S.E., M.Si. selaku sekretaris Departemen Ekonomi Pembangunan, Bapak Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA. selaku penasehat Akademik penulis, serta seluruh dosen fakultas

Ekonomi dan Bisnis. Terima kasih atas segala bantuan yang senantiasa diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Departemen Ekonomi Pembangunan.

4. Bapak Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA. selaku pembimbing I dan Bapak M. Agung Ady Mangilep, SE, MSi. selaku pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas segala keikhlasan dan ketersediaan meluangkan waktu dalam memberikan arahan, segala pemikiran, ide, bantuan nasehat serta ilmu dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA. Ph.D. dan Ibu Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si. selaku dosen penguji yang memberikan motivasi dan inspirasi bagi penulis untuk terus belajar dan berusaha untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.
6. Segenap pegawai akademik, kemahasiswaan dan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, terima kasih telah membantu dalam pengurusan administrasi selama masa studi penulis.
7. Teman-teman angkatan 2016 “SPHERE”. Terima kasih atas segala dukungan dan bantuan yang di berikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga Tuhan YME senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya selalu. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis pada khususnya maupun bagi yang memerlukan bagi umumnya.

Makassar, 31 Agustus 2020

Monica Christiani

ABSTRAK

Analisis Pengaruh *E-Money*, Nilai Tukar dan Suku Bunga Acuan Terhadap Inflasi di Indonesia

Analysis of the Effects of E-Money, Exchange Rate and Reference Interest Rates on Inflation in Indonesia

Monica Christiani

Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA.

M. Agung Ady Mangilep, SE, MSi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *e-money* dan faktor moneter terhadap inflasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas yaitu *e-money*, nilai tukar, suku bunga acuan, serta inflasi sebagai variabel terikat. Sumber data penelitian ini dari data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda berbasis *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil penelitian ini menunjukkan *e-money* tidak berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia, sedangkan nilai tukar dan suku bunga acuan menunjukkan adanya pengaruh terhadap inflasi di Indonesia.

Kata Kunci: *e-money*, nilai tukar, suku bunga acuan, inflasi.

This study aims to find the effect of e-money and monetary factors on inflation in Indonesia. This study uses three independent variables namely e-money, exchange rate, reference interest rates, and inflation as the dependent variable. The source of this research data is secondary data. This research uses a quantitative approach and the data analysis method used is multiple linear regression based on Ordinary Least Square (OLS). The results of this study show that e-money has no effect on inflation in Indonesia, while the exchange rate and interest rates explain influence on inflation in Indonesia.

***Keywords**: e-money, exchange rate, reference interest rates, inflation.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
PRAKATA vi
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
B A B I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Manfaat Penelitian 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
2.1 Landasan Teoritis 9
2.1.1 Inflasi 9
2.1.2 Uang Elektronik (*E-Money*) 14
2.1.3 Nilai Tukar 16
2.1.4 Suku Bunga Acuan 20
2.2 Hubungan Antar Variabel 22
2.2.1 Pengaruh *E-money* terhadap Inflasi 22
2.2.2 Pengaruh Nilai Tukar terhadap Inflasi 23
2.2.3 Pengaruh Suku Bunga Acuan terhadap Inflasi 25
2.3 Penelitian Terdahulu 27
2.4 Kerangka Konseptual Penelitian 29

2.5 Hipotesis Penelitian 30
B A B III METODE PENELITIAN 31
3.1 Ruang Lingkup Penelitian 31
3.2 Jenis dan Sumber Data 31
3.3 Metode Pengumpulan Data 31
3.4 Metode Analisis Data 32
3.5 Uji Statistik 33
3.5.1 Uji Statistik t 34
3.5.2 Uji statistik F 34
3.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R2) 34
3.6 Definisi Operasional Variabel 35
B A B IV HASIL PENELTIAN DAN PEMBAHASAN 37
4.1 Perkembangan Variabel Penelitian 37
4.1.1 Perkembangan Inflasi di Indonesia periode 2013 – 2018 37
4.1.2 Perkembangan *E-Money* di Indonesia periode 2013 – 2018 39
4.1.3 Perkembangan Nilai Tukar di Indonesia periode 2013 – 2018 40
4.1.4 Perkembangan Suku Bunga Acuan di Indonesia periode 2013 – 2018 42
4.2 Hasil Estimasi Variabel-variabel Penelitian 44
4.2.1 Uji Statistik T 45
4.2.2 Uji Statisfik F 46
4.2.3 Koefisien Determinan (R^2) 46
4.3 Pembahasan Hasil Estimasi dan Interpretasinya 47
4.3.1 Pengaruh *E-money* terhadap Inflasi di Indonesia 2013-2018 47
4.3.2 Pengaruh Nilai Tukar terhadap Inflasi di Indonesia 2013-2018 48
4.3.3 Pengaruh Suku Bunga Acuan terhadap Inflasi di Indonesia 2013-2018 49
B A B V PENUTUP 51
5.1 Kesimpulan 51
5.2 Saran 52
DAFTAR PUSTAKA 54
LAMPIRAN 57

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.1	Pergerakan rata-rata nilai tukar rupiah periode 2013-2018	5
2.1	Kerangka Konseptual Penelitian	30
4.1	Inflasi di Indonesia tahun 2013 – 2018	38
4.2	*E-Money* di Indonesia tahun 2013 – 2018	39
4.3	Nilai Tukar di Indonesia tahun 2013 – 2018	41
4.4	Suku Bunga Acuan di Indonesia tahun 2013 – 2018	43
4.5	Hasil Estimasi Pengaruh *E-money*, Nilai Tukar dan Suku Bunga Acuan Terhadap Inflasi di Indonesia	44

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Inflasi di Indonesia tahun 2014-2018	3
1.2	Perkembangan transaksi *e-money* periode 2014-2018	4
4.1	Hasil Estimasi Melalui Model *Least Square*	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Data yang digunakan	57
2	Hasil regresi menggunakan aplikasi eviews 9	61
3	Biodata	63

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inflasi merupakan masalah ekonomi yang tidak bisa diabaikan, karena memiliki dampak yang sangat luas bagi perekonomian negara seperti pertumbuhan ekonomi yang lambat dan pengangguran yang senantiasa meningkat. Oleh karena itu, inflasi sering menjadi target kebijakan pemerintah. Berkenaan dengan hal tersebut, upaya pengendalian inflasi begitu penting untuk dilakukan (Sasana 2004).

Prospek pembangunan ekonomi jangka panjang akan menjadi semakin tidak baik atau semakin memburuk jika inflasi tidak dapat dikendalikan. Inflasi akan cenderung menjadi bertambah cepat apabila tidak segera diatasi. Inflasi yang bertambah serius cenderung untuk mengurangi investasi yang produktif, mengurangi ekspor dan menaikkan impor. Kecenderungan ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi (sukirno 2000).

Setiap perekonomian dalam suatu negara pada umumnya selalu ingin mewujudkan tingkat kesejahteraan ekonomi yang tinggi yang ditandai dengan tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) yang berarti semakin sedikit kapasitas pengangguran faktor produksi yang ada dalam perekonomian tersebut. Suatu negara dari waktu ke waktu juga ingin mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang mantap dan teguh. Namun ada kalanya penggunaan faktor produksi yang semakin mendekati kapasitas berproduksi dalam perekonomian tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan ekonomi yang lain yaitu inflasi. Suatu negara yang membuka jalur perdagangan dengan

negara lain juga kerap menghadapi masalah ketimpangan dalam neraca pembayarannya dimana lebih banyak aliran uang yang keluar daripada yang masuk (Sukirno,2000).

Indonesia mengalami kenaikan serta penurunan angka inflasi setiap tahunnya. Angka inflasi sejak 2014-2018 yang terbesar berada pada tahun 2014 sebesar 8,36%, sedangkan angka inflasi terendah berhasil dicapai pada 2016 dengan inflasi sebesar 3,02%. Pada 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2018 mengalami inflasi sebesar 0,62% (*month to month/mtm*). Angka ini mengalami kenaikan dari November 2018 yang sebesar 0,27%. Pada Desember 2014 terjadi inflasi sebesar 2,46% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 119,00. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Desember) 2014 dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2014 terhadap Desember 2013) masing-masing sebesar 8,36%. Komponen inti pada Desember 2014 mengalami inflasi sebesar 1,02%, tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari–Desember 2014) dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (Desember 2014 terhadap Desember 2013) masing-masing sebesar 4,93%. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi inflasi atau Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember sebesar 0,96%. Adapun inflasi pada tahun kalender terjadi yakni 3,35%, inflasi tahun ke tahun (*year on year*) 7,26% dan komponen inti 0,23%. Sementara itu, inflasi komponen inti *year on year* 3,95%. Andil inflasi yang tertinggi terdapat pada kelompok bahan makanan sebesar 3,2% atau menyumbang 0,96% dari total inflasi.

Tabel 1.1 inflasi di Indonesia periode 2014-2018

Tahun	Rata-rata inflasi
2014	8,36%
2015	3,35%
2016	3,02%
2017	3,61%
2018	3,13 %

Sumber: Bank Indonesia

Setiap negara yang melaksanakan pembangunan akan menuju pada peningkatan kemakmuran masyarakat luas atau pemerataan kesejahteraan. Pemerataan hasil-hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Pada kenyataanya yang terjadi adalah jarak (*gap*) antara kelompok penduduk kaya dengan kelompok penduduk miskin terlihat semakin lebar. Dengan demikian tujuan dari penerapan berbagai kebijakan ekonomi adalah menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat, dengan kata lain pemerataan distribusi pendapatan (Tambunan, 2001).

Menurut kajian Bank Indonesia pada tahun 2006 dinyatakan bahwa *e-money* juga dapat mengurangi jumlah uang beredar sehingga secara tidak langsung *e-money* juga berpengaruh terhadap Inflasi di Indonesia. Di Indonesia sendiri, *e-money* sudah diperkenalkan sejak tahun 2007, hal ini dirasa terlambat dibanding dengan Negara Asia lainnya seperti Hongkong yang telah mengenalkan *e-money* pada Oktober 1996 ataupun Singapura pada tahun 2000. Untuk mendukung penggunaaan *e-money* sebagai alat pembayaran di Indonesia, Bank Indonesia sebagai lembaga Independen yang mana salah satu tugasnya adalah untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 perubahan atas Udang-Undang Nomor 23 Tahun 1998 Tentang Bank Indonesia telah mengeluarkan suatu aturan mengenai uang elektronik yang dirangkum dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI Tahun 2009 tentang Uang Elektronik (*Elektronic Money*).

Tabel 1.2 Perkembangan transaksi *e-money* periode 2014-2018

Periode	Volume (Rp)	(%)	Nominal (Rp)	(%)
2014	203,369,990	47,47	3,319,556	14,17
2015	535,579,528	163,352	5,283,018	59,14
2016	683,133,352	27,55	7,063,689	33,70
2017	943,319,933	38,08	12,375,469	75,19
2018	2,922,698,905	209,831	47,198,616	281,388

Sumber: Bank Indonesia (2019)

Pada tabel 1.2 berdasarkan data statistik Bank Indonesia (BI), penggunaan e-money pada tahun 2018 lalu mengalami kenaikan yang sangat pesat yakni hingga 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini tentu menyebabkan nilai transaksi juga ikut mengalami kenaikan, hingga menginjak Rp.47,2 triliun. Adapun volume transaksi e-money pada tahun 2018 mencapai 2,92 miliar atau tumbuh 209,83% secara tahunan. Nilai transaksi pada tahun 2018 mencapai Rp.47,2 triliun atau tumbuh 278,33%. Bertambahnya jumlah penerbit e-money tentu menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan sistem pembayaran elektronik ini. Menurut data Bank Indonesia, hingga Januari 2019 setidaknya tercatat ada 36 penerbit e-money yang telah mendapat izin dari Bank Indonesia, baik penerbit yang berasal dari perbankan maupun dari sektor industri lain. Hal ini dimaksudkan agar pertumbuhan uang elektonik semakin luas dan dapat mengurangi penggunaan uang tunai dalam bertransaksi guna menjaga efisiensi biaya transaksi.

Selain itu, penyebab terjadinya Inflasi di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor luar negeri, mengingat bahwa Indonesia adalah suatu negara dengan perekonomian terbuka. Hal ini tentu memiliki dampak, yaitu jika terjadi gejolak perekonomian di luar negeri akan berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Dalam perekonomian terbuka, kestabilan tingkat harga dapat dilihat dari nilai tukar suatu mata uang. Tinggi rendahnya nilai tukar suatu mata uang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran terhadap mata uang tersebut.

Terdepresiasinya nilai rupiah yang cukup tinggi mengakibatkan melambungnya harga barang-barang terutama barang-barang impor atau bahan baku industri yang masih belum dapat diproduksi di dalam negeri. Situasi demikian menyebabkan meningkatnya laju inflasi, dan apabila situasi ini terjadi terus-menerus dan semakin hari harga barang terus meningkat, maka akan menyebabkan laju inflasi yang cukup tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Nilai tukar merupakan variabel makro yang sangat penting bagi perekonomian, karena nilai tukar digunakan untuk mengukur level perekonomian suatu negara. Nilai tukar juga memegang peranan penting dalam perdagangan antar negara. Perubahan nilai tukar akan berdampak pada aktivitas perdagangan maupun aktivitas ekonomi suatu negara. Kurs atau nilai tukar adalah harga sebuah mata uang dari suatu negara, yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya (Krugman, 2005).

Grafik 1.1
PERGERAKAN RATA-RATA NILAI TUKAR RUPIAH TAHUN 2013-2018 (per USD)

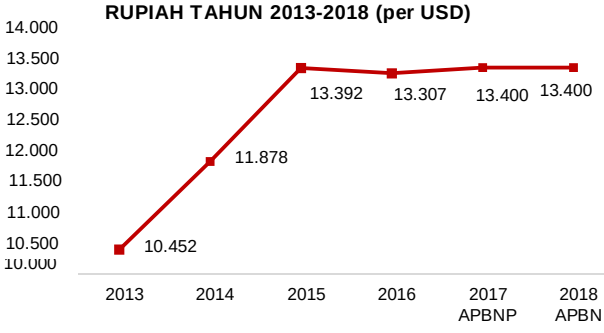

Sumber: Bank Indonesia dan Kemenkeu

Pada gambar 1.1 nilai tukar rupiah terus mengalami peningkatan mulai dari tahun 2013 sebesar Rp10.452 per USD hingga pada tahun 2018 bergerak pada kisaran RP13.400 per USD. Selain faktor global, perkiraan nilai tukar rupiah juga dipengaruhi oleh kinerja perekonomian domestik. Akselerasi proyek-proyek infrastruktur, keberhasilan program pengampunan pajak, terjaganya tingkat inflasi, positifnya neraca pembayaran, terkendalinya defisit transaksi berjalan, serta

kuatnya cadangan devisa menunjukkan kuatnya fundamental perekonomian Indonesia.

Selanjutnya faktor lain yang memiliki hubungan dengan inflasi yaitu tingkat suku bunga acuan, dimana suku bunga acuan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan dapat mempengaruhi inflasi ((Santoso, 2010), (Sinambela, 2011)). Nopirin (2000) mendefinisikan suku bunga adalah biaya yang harus dibayar oleh peminjam atas pinjaman yang diterima dan merupakan imbalan bagi pemberi pinjaman atas investasinya. Kenaikan tingkat suku bunga yang sangat tinggi, pada satu sisi akan efektif untuk mengurangi money suplly, tetapi di sisi lain akan meningkatkan suku bunga kredit untuk sektor riil. Oleh karena itu, tingkat suku bunga dapat memicu inflasi (Atmadja, 1999).

Fluktuasi tingkat suku bunga acuan mempunyai implikasi yang penting terhadap sektor riil maupun sektor moneter dalam perekonomian. Suku bunga acuan yang tinggi akan menjadi masalah yang menyulitkan bagi investasi di sektor riil. Tapi suku bunga acuan yang tinggi akan merangsang lebih banyak tabungan masyarakat. Untuk itulah tingkat fluktuasi bunga harus senantiasa terkontrol agar tetap mendorong kegiatan investasi dan produksi serta tidak mengurangi hasrat masyarakat untuk menabung dan tidak mengakibatkan pelarian modal ke luar negeri.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwasanya inflasi sudah menjadi masalah perekonomian di Indonesia sejak lama dimana fenomena inflasi ini sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berkaitan dengan kondisi perekonomian di Indonesia, maka penelitian ini difokuskan dengan judul **"Analisis Pengaruh *E-money*, Nilai Tukar, dan Suku Bunga Acuan terhadap Inflasi di Indonesia.**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka yang menjadi masalah pokok pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Uang Elektronik (*E-money*) terhadap Inflasi di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Nilai Tukar terhadap Inflasi di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh Suku Bunga Acuan terhadap Inflasi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Uang Elektronik (*E-Money*) terhadap Inflasi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Nilai Tukar terhadap Inflasi di Indonesia.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Suku Bunga Acuan terhadap Inflasi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai tambahan wawasan ilmiah dan ilmu pengetahuan bagi pembaca.
2. Sebagai tambahan informasi dan tambahan literatur bagi masyarakat dan mahasiswa/i yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

3. Sebagai tambahan informasi dan tambahan literatur bagi mahasiswa/i Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, khususnya mahasiswa/i Jurusan Ilmu Ekonomi.
4. Sebagai bahan masukan atau kajian dan bahan perbandingan dalam mengambil keputusan oleh pihak yang berwenang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Inflasi

Terdapat banyak pengertian inflasi dalam ruang lingkup ilmu ekonomi. Keanekaragaman pengertian ini disebabkan oleh pengaruh inflasi terhadap berbagai sektor perekonomian. Menurut Mankiw (2006) inflasi merupakan peningkatan dalam seluruh tingkat harga. Kemudian, Sukirno (2008) menyatakan bahwa inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku secara umum dalam suatu perekonomian. Sejalan dengan Sukirno, Boediono (2009) mendefinisikan inflasi sebagai kecenderungan dari harga yang naik secara umum dan terus menerus. Selanjutnya, inflasi seperti yang dikutip bi.go.id diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Lebih dalam lagi, menurut Sunariyah (2006), Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara terus menerus dan jika dilihat dari segi konsumen, inflasi yang tinggi mengakibatkan daya beli kosumen menurun, jika dilihat dari segi perusahaan, inflasi dapat mengakibatkan biaya faktor produksi dan menurunkan profitabilitas perusahaan.

Sementara itu, menurut Case dan Fair (2007), infasi diartikan sebagai kenaikan jumlah uang beredar atau kenaikan likuiditas dalam suatu perekonomian. Tandelilin (2010), inflasi merupakan kecenderungan terjadinya peningkatan produk secara keseluruhan, jika mengalami kenaikan maka akan mengurangi tingkat pendapatan riil yang diperoleh investor dari investasi, dan sebaliknya, jika

mengalami penurunan maka hal ini merupakan sinyal positif bagi investor seiring dengan turunnya resiko daya beli uang dan resiko penurunan pendapatan riil. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Menurut Fahmi (2012), inflasi merupakan suatu kejadian yang menggambarkan situasi dan kondisi dimana harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata uang mengalami pelemahan.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut terdapat aspek-aspek yang perlu digarisbawahi, yaitu: (1) *Tendency* atau kecenderungan harga-harga untuk meningkat, artinya dalam suatu waktu tertentu dimungkinkan terjadinya penurunan harga, tetapi menunjukkan kecenderungan untuk meningkat; (2) *Sustained*. Peningkataan harga tersebut tidak hanya terjadi pada waktu tertentu atau sekali waktu saja, melainkan secara terus menerus dan dalam jangka waktu yang lama; (3) *General Level of Prices*. Tingkat harga yang dimaksud adalah tingkat harga barang-barang secara umum sehingga tidak hanya satu macam barang saja.

Selain Inflasi (*Inflation*), perlu juga dipahami Tingkat Inflasi (*Inflation Rate*) dan Indeks Harga (*Price Index*). Jika inflasi adalah tingkat perubahan harga itu sendiri, maka tingkat inflasi adalah akumulasi dari inflasi terdahulu atau persentase perubahan dalam tingkat harga, sedangkan Indeks Harga mengukur biaya dari sekelompok barang tertentu sebagai persentasi dari kelompok yang sama pada periode dasar (*base period*).

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa

tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota.

Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokan ke dalam 7 kelompok pengeluaran (berdasarkan *the Classification of individual consumption by purpose* - COICOP), yaitu : (1) Kelompok Bahan Makanan; (2) Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau; (3) Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar; (4) Kelompok Sandang; (5) Kelompok Kesehatan; Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga; (6) Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan.

Disamping pengelompokan berdasarkan COICOP tersebut, BPS saat ini juga mempublikasikan inflasi berdasarkan pengelompokan yang lainnya yang dinamakan disagregasi inflasi. Disagregasi inflasi tersebut dilakukan untuk menghasilkan suatu indikator inflasi yang lebih menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental. Di Indonesia, disagregasi inflasi IHK tersebut dikelompokan menjadi Inflasi Inti dan Inflasi non inti. Inflasi inti adalah komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (*persistent component*) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti: interaksi permintaan-penawaran, lingkungan eksternal (nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang), dan ekspektasi Inflasi dari pedagang dan konsumen. Inflasi non Inti adalah komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Komponen inflasi non inti terdiri dari : (1) Inflasi Komponen Bergejolak (*Volatile Food*), yaitu dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional; (2) Inflasi Komponen Harga yang diatur Pemerintah (*Administered Prices*), yaitu Inflasi yang

dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dll.

Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi *supply* (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya *cost push inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*administered price*), dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi.

Faktor penyebab terjadi *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (*agregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Ekspektasi inflasi tersebut apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau *forward looking*. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum provinsi (UMP). Meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, namun harga barang dan jasa pada saat-saat hari raya keagamaan meningkat lebih tinggi dari kondisi *supply-demand* tersebut. Demikian halnya pada saat penentuan UMP, pedagang ikut pula meningkatkan harga barang meski kenaikan upah tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan (Bank Indonesia).

Menurut Sukirno (2006), ada tiga kelompok teori mengenai inflasi yang membahas tentang aspek-aspek tertentu, tiga teori tersebut yaitu Teori Kuantitas, Teori Keynes, dan Teori Strukturalis. Inti dari teori kuantitas adalah, pertama

bahwa inflasi itu hanya biasa terjadi jika ada penambahan volume jumlah uang beredar, baik uang kartal maupun uang giral. Kedua, laju inflasi ditentukan oleh penambahan jumlah uang yang beredar dan harapan masyarakat mengenai kenaikan harga-harga. Bila terjadi kegagalan panen misalnya, yang menyebabkan harga beras naik, tetapi apabila jumlah uang beredar tidak ditambah, maka kenaikan harga beras akan berhenti dengan sendirinya. Pada teori Keynes, terdapat kelompok sosial yang cenderung menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang dapat disediakan oleh masyarakat (*inflatory gap*). Kelompok-kelompok sosial ini misalnya orang-orang pemerintah sendiri, pihak swasta atau bisa juga serikat buruh yang berusaha mendapatkan kenaikan gaji atau upah. Hal ini akan berdampak terhadap permintaan barang dan jasa yang pada akibatnya akan menaikkan harga. Proses inflasi akan terus berlanjut selama jumlah permintaan efektif dari masyarakat melebihi jumlah output yang bisa dihasilkan. Inflasi ini akan berhenti jika permintaan efektif total tidak melebihi harga-harga yang berlaku. Selanjutnya teori strukturalis atau yang biasa disebut dengan teori inflasi jangka panjang menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi. Karena struktur pertambahan produksi barang-barang ini terlalu lambat dibandingkan dengan pertumbuhan kebutuhan masyarakat, akibatnya penawaran barang kurang dari yang dibutuhkan masyarakat, sehingga harga barang dan jasa meningkat.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Kedua, inflasi yang tidak stabil

akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

2.1.2 Uang Elektronik (*E-Money*)

Dalam publikasi *Bank for International Settlement* mendefinisikan uang elektronik sebagai *Stored Value* atau *Prepaid* dimana uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang.

Uang elektronik yang dimaksud adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di Bank, dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah, yang digunakan untuk melakukan tranksaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media elektronik tersebut.

Menurut Peraturan Bank Indonesia NOMOR:11/12PBI/2009, Uang elekronik adalah pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut: (1) Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. (2) Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau *chip*; (3) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan (4) nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Electronic money (*e-money*) adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit, dimana nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media atau *server* yang digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang. Kelebihan *e-money* memberikan kelebihan dibandingkan dengan alat transaksi lainnya. Khususnya untuk ritel, transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan murah, sehingga di masa depan *e-money* memiliki potensi untuk menggeser peran uang tunai untuk transaksi-transaksi tersebut.

Jenis uang elektronik berdasarkan tercatat atau tidaknya data identitas pemegang pada penerbit uang elektronik dibagi menjadi: (1) Uang Elektronik *Registerd*, merupakan uang elektronik yang data identitas pemegangnya tercatat/terdaftar pada penerbit uang elektronik. Dalam kaitan ini, penerbit harus menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam menerbitkan uang elektronik yang tersimpan pada media *chip* atau *server* untuk jenis *registerd* adalah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah). (2) Uang Elektronik *Unregisterd*, merupakan Uang Elektronik yang data identitasnya pemegang tidak tercatat/terdaftar pada penerbit Uang Elektronik. Batas maksmimum Uang Elektronik yang tersimpan pada media chip atau server untuk jenis unregisterd adalah Rp1.000.000, 00 (satu juta Rupiah).

Penyelenggara uang elektronik yang wajib mengajukan izin sebagaimana peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang uang elektronik dan surat edaran Bank Indonesia (SE BI) No.11/11/DASP tentang uang elektronik adalah prinsipal, penerbit, *acquirer*, penyelenggara kliring maupun penyelenggara penyelesaian akhir.

Tim Inisiatif Bank Indonesia (2006) mengungkapkan dalam perekonomian modern lalu lintas pertukaran barang dan jasa sudah sedemikian cepatnya sehingga memerlukan dukungan tersedianya sistim pembayaran yang handal

yang memungkinkan dilakukannya pembayaran secara lebih cepat, efisien, dan aman. Penggunaan uang *cash* sebagai alat pembayaran dirasakan mulai menimbulkan masalah, terutama tingginya biaya *cash handling* dan rendahnya *velocity of money*.

Menurut Hidayati (2006) beberapa manfaat atau kelebihan dari penggunaan *e-money* dibandingkan dengan uang tunai maupun alat pembayaran non-tunai lainnya, antara lain: (1) Lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil (*micro payment*), disebabkan nasabah tidak perlu menyediakan sejumlah uang pas untuk suatu transaksi atau harus menyimpan uang kembalian. Selain itu, kesalahan dalam menghitung uang kembalian dari suatu transaksi apabila menggunakan *e-money*. (2) Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi dengan *e-money* dapat dilakukan jauh lebih singkat dibandingkan transaksi dengan kartu kredit atau kartu debit, karena tidak harus memerlukan otorisasi *on-line*, tanda tangan maupun PIN. Selain itu, dengan transaksi *off-line*, maka biaya komunikasi dapat dikurangi. (3) *Electronic Value* dapat diisi ulang kedalam kartu *e-money* melalui berbagai sarana yang disediakan oleh *issuer*.

Perkembangan e-money selain memberi kemudahan serta pengaruh positif lainnya, juga memiliki isu yang menjadi kontroversi dalam dunia perekonomian Indonesia sehingga menjadi perhatian bagi Bank Indonesia. Isu tersebut anara lain terkait tentang aspek teknis dan keamanan, perlindungan konsumen, aspek hukum, aspek kelembagaan, serta implikasi e-money terhadap kebijakan moneter (Hidayati 2006).

2.1.3 Nilai Tukar

Menurut Mankiw (2007), nilai tukar mata uang antara dua Negara adalah harga dari mata uang yang digunakan oleh peduduk tersebut untuk saling melakukan perdagangan antara satu sama lain.

Definisi lain Kurs valuta asing (*foreign exchange rate*) adalah jumlah uang domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing (Murni, 2006). Selain itu, Sukirno, (2006) mengatakan bahwa nilai tukar atau kurs valuta asing menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Selanjutnya menurut Mankiw (2006), nilai tukar mata uang antar dua negara adalah harga dari mata uang yang digunakan oleh penduduk negara-negara tersebut untuk saling melakukan perdagangan satu sama lain. Sementara itu, menurut Triyono (2008), kurs (*exchange rate)* adalah pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, yaitu merupakan perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai tukar atau kurs valuta asing adalah harga dari sebuah mata uang suatu negara yang di nilai atau dinyatakan dalam mata uang lainnya.

Dalam konsep nilai tukar, dikenal istilah apresiasi dan depresiasi. Apabila nilai tukar didefinisikan sebagai nilai Rupiah dalam valuta asing dapat diformulasikan sebagai berikut:

$NT_{IDR/USD}$ = Rupiah yang diperlukan untuk membeli 1 dolar Amerika (USD)

$NT_{IDR/YEN}$ = Rupiah yang diperlukan untuk membeli satu Yen Jepang

Dalam hal ini, apabila NT meningkat maka berarti Rupiah mengalami depresiasi, sedangkan apabila NT menurun maka Rupiah mengalami apresiasi. Sementara untuk negara yang menerapkan sistem nilai tukar tetap, perubahan nilai tukar dilakukan secara resmi oleh pemerintah. Kebijakan suatu negara secara resmi menaikkan nilai mata uangnya terhadap mata uang asing disebut dengan revaluasi, sementara kebijakan menurunkan nilai mata uang terhadap mata uang asing tersebut devaluasi.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian tersebut diberikan contoh sebagai berikut. Misalnya, nilai tukar satu dolar Amerika

(USD) terhadap mata uang Rupiah sebesar Rp8.500. Apabila nilai tukar satu USD berubah menjadi Rp9.000, maka nilai tukar rupiah mengalami penurunan atau depresiasi. Sebaliknya apabila nilai tukar 1 USD berubah menjadi sebesar Rp8.000, maka nilai tukar rupiah mengalami peningkatan atau apresiasi.

Apabila nilai tukar didefinisikan sebagai nilai valuta asing terhadap Rupiah

$NT_{USD/IDR}$ = dolar Amerika yang diperlukan untuk membeli satu Rupiah

$NT_{YEN/IDR}$ = Yen yang diperlukan untuk membeli satu Rupiah

Dengan menggunakan konsep ini, apabila NT meningkat, maka Rupiah mengalami apresiasi untuk sistem nilai tukar mengambang bebas atau revaluasi untuk sistem nilai tukar tetap, sedangkan apabila NT menurun, maka Rupiah mengalami depresiasi untuk sistem nilai tukar mengambang bebas atau devaluasi untuk sistem nilai tukar tetap (simorangkir dan suseno, 2004).

Dengan contoh di atas, maka dalam pengertian ini, satu Rupiah dinilai sebesar 1/8.500 USD atau 0,00012 USD. Nilai tukar rupiah mengalami depresiasi jika menurun atau dengan contoh di atas sebesar 1/9000 USD atau 0,00011, mengalami apresiasi dengan nilai pada contoh 1/8.000 USD = 0,00013 USD.

Dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi permintaan valuta asing, yaitu faktor pembayaran impor, faktor aliran modal keluar (*capital outflow*), dan kegiatan spekulasi. Pada faktor pembayaran impor, semakin tinggi impor barang dan jasa, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing sehingga nilai tukar akan cenderung melemah. Sebaliknya, jika impor menurun, maka permintaan valuta asing menurun sehingga mendorong menguatnya nilai tukar. Sementara itu, pada faktor aliran modal keluar (*capital outflow*), semakin besar aliran modal keluar, maka semakin besar permintaan valuta asing dan pada lanjutannya akan memperlemah nilai tukar. Aliran modal keluar meliputi pembayaran hutang penduduk Indonesia (baik swasta dan pemerintah) kepada pihak asing dan penempatan dana penduduk Indonesia

ke luar negeri. Kemudian pada kegiatan spekulasi, semakin banyak kegiatan spekulasi valuta asing yang dilakukan oleh spekulan maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing sehingga memperlemah nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing.

Sementara itu, penawaran valuta asing dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor penerimaan hasil ekspor dan faktor aliran modal masuk. Pada faktor penerimaan hasil ekspor, semakin besar volume penerimaan ekspor barang dan jasa, maka semakin besar jumlah valuta asing yang dimiliki oleh suatu Negara dan pada lanjutannya nilai tukar terhadap mata uang asing cenderung menguat atau apresiasi. Sebaliknya, jika ekspor menurun, maka jumlah valuta asing yang dimiliki semakin menurun sehingga nilai tukar juga cenderung mengalami depresiasi. Sedangkan pada faktor aliran modal masuk (*capital inflow*), semakin besar aliran modal masuk, maka nilai tukar akan cenderung semakin menguat. Aliran modal masuk tersebut dapat berupa penerimaan hutang luar negeri, penempatan dana jangka pendek oleh pihak asing (*Portfolio investment*) dan investasi langsung pihak asing (*foreign direct invetment*).

Syarifuddin (2015) menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat tiga sistem nilai tukar, yaitu sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*), sistem nilai tukar mengambang (*floating exchange rate*), dan sistem nilai tukar mengambang terkendali (*managed floating exchange rate*). Pada sistem nilai tukar tetap, nilai tukar atau kurs suatu mata uang terhadap mata uang lain ditetapkan pada nilai tertentu, misalnya, nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika dipatok Rp 8.000,- per dolar. Pada nilai tukar ini bank sentral akan siap untuk menjual atau membeli kebutuhan devisa untuk mempertahankan nilai tukar yang ditetapkan. Apabila nilai tukar tersebut tidak lagi dapat dipertahankan, bank sentral dapat melakukan devaluasi ataupun revaluasi atas nilai tukar yang ditetapkan. Pada sistem nilai tukar mengambang, nilai tukar dibiarkan bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Dengan demikian, nilai

tukar akan menguat apabila terjadi kelebihan penawaran valuta asing dan sebaliknya nilai tukar mata uang domestik akan melemah apabila terjadi kelebihan permintaan valuta asing. Bank sentral dapat saja melakukan intervensi di pasar valuta asing, yaitu dengan menjual devisa dalam hal terjadi kekurangan pasokan atau membeli devisa apabila terjadi kelebihan penawaran untuk menghindari gejolak nilai tukar yang berlebihan di pasar. Akan tetapi, intervensi dimaksud tidak diarahkan untuk mencapai target tingkat nilai tukar tertentu atau dalam kisaran tertentu. Sistem nilai tukar mengambang terkendali merupakan sistem yang berada di antara kedua sistem nilai tukar di atas. Dalam sistem nilai tukar ini, bank sentral menetapkan batasan suatu kisaran tertentu dari pergerakan nilai tukar yang disebut intervention band atau batas pita intervensi. Nilai tukar akan ditentukan sesuai dengan mekanisme pasar sepanjang berada di dalam batas kisaran pita intervensi tersebut. Apabila nilai tukar menembus batas atas atau batas bawah dari kisaran tersebut, maka bank sentral akan secara otomatis melakukan intervensi di pasar valuta asing sehingga nilai tukar bergek kembali ke dalam pita intervensi.

2.1.4 Suku Bunga Acuan

Sejak awal Juli 2005, Bank Indonesia menggunakan mekanisme suku bunga BI (BI *rate*) yang merupakan target suku bunga SBI yang diinginkan oleh Bank Indonesia untuk pelelangan pada masa periode tertentu. Suku bunga ini kemudian yang digunakan sebagai acuan para pelaku pasar dalam mengikuti pelelangan. Definisi suku bunga sendiri menurut Bank Indonesia adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau kebijakan moneter Bank Indonesia yang ditetapkan pada Rapat Dewan Gubernur triwulanan yang berlaku selama triwulan berjalan, kecuali ditetapkan berbeda oleh Rapat Dewan Gubernur bulanan dalam triwulan yang sama. Suku bunga digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan operasi pengendalian moneter untuk mengarahkan agar rata-rata

tertimbang suku bunga SBI 1 bulan hasil lelang operasi pasar terbuka berada di sekitar suku bunga. Suku bunga SBI 1 bulan diharapkan mempengaruhi suku bunga pasar uang antar bank dan suku bunga jangka yang lebih panjang. Perubahan suku bunga (SBI tenor 1 bulan) ditetapkan secara konsisten dan bertahap dalam kelipatan 25 basis poin. Suku bunga ditetapkan oleh dewan gubernur dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: (1) Rekomendasi suku bunga yang dihasilkan oleh fungsi reaksi kebijakan dalam model ekonomi untuk pencapaian sasaran inflasi; (2) Berbagai informasi lainnya seperti indikator makro ekonomi, survei, pendapat ahli, hasil-hasil riset ekonomi.

Seperti yang dikutip dari bi.go.id Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan mengimplementasikan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yaitu BI 7-Day (Reverse) Repo Rate, yang berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016, menggantikan BI Rate.

Penguatan kerangka operasi moneter ini merupakan hal yang lazim dilakukan di berbagai bank sentral dan merupakan *best practice internasional* dalam pelaksanaan operasi moneter. Kerangka operasi moneter senantiasa disempurnakan untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Instrumen BI 7-day (Reverse) Repo Rate digunakan sebagai suku bunga kebijakan baru karena dapat secara cepat memengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil. Instrumen BI 7-Day Repo Rate sebagai acuan yang baru memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar, dan mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya penggunaan instrumen repo.

Dengan penggunaan instrumen BI 7-day (Reverse) Repo Rate sebagai suku bunga kebijakan baru, terdapat tiga dampak utama yang diharapkan. Pertama, menguatnya sinyal kebijakan moneter dengan suku bunga (Reverse) Repo Rate 7 hari sebagai acuan utama di pasar keuangan. Kedua, meningkatnya

efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan. Ketiga, terbentuknya pasar keuangan yang lebih dalam, khususnya transaksi dan pembentukan struktur suku bunga di pasar uang antarbank (PUAB) untuk tenor 3-12 bulan.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Pengaruh *E-money* terhadap Inflasi

Perkembangan *e-money* selain memberi kemudahan serta pengaruh positif lainnya, juga memiliki isu yang menjadi kontrovesi dalam dunia perekonomian Indonesia sehingga menjadi perhatian bagi Bank Indonesia. Isu tersebut antara lain terkait tentang aspek teknis dan keamanan, perlindungan konsumen, aspek hukum, aspek kelembagaan, serta implikasi *e- money* terhadap kebijakan moneter (Hidayati 2006).

Teori kuantitas uang yang dikemukakan Irving Fisher menyatakan bahwa inflasi disebabkan oleh jumlah uang, dengan asumsi kecepatan perputaran uang dan volume barang yang diperdagangkan tetap. Teori tersebut dibantah oleh Keynes. Keynes mengungkapkan bahwa jumlah uang bukan satu-satunya penyebab inflasi. Menurut teori ini inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonomisnya (Sinaungan, 1995). Mengacu pada teori kuantitas, Keynes berpendapat bahwa kecepatan perputaran uang tidak konstan atau berubah-ubah. Apabila terjadi penambahan pada uang beredar maka transaksi yang dilakukan oleh masyarakat akan meningkat. Fenomena tersebut selanjutnya akan meningkatkan permintaan output oleh masyarakat. Ketidakmampuan produsen dalam memenuhi permintaan output tersebut memicu timbulnya inflasi. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Milton Friedman dalam teori kuantitas modern. Menurut Friedman perputaran uang

dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Berbagai macam faktor tersebut di antaranya yaitu: tingkat harga umum, penghasilan dari obligasi dan saham, inflasi, selera, teknologi dantransportasi, serta perbandingan kesejahteraan antara manusia (Sinaungan, 1995).

Jati (2015) yang mengungkapkan bahwa teknologi sangat berperan dalam mendorong konsumsi, utamanya pada masyarakat kelas menengah agar lebih konsumtif. Kehadiran *e-money* menjadi salah satu cara untuk mendorong masyarakat agar lebih konsumtif. Sentuhan teknologi dalam konsumsi melalui adanya *e-money* memberi warna baru dalam memaknai konsumsi. Tingkat konsumsi yang mengalami kenaikan secara terus menerus pada akhirnya dapat menimbulkan kenaikan inflasi.

Berbagai studi mengenai korelasi *e-money* dan inflasi membuktikan adanya hubungan positif. Hal itu sesuai dengan pernyataan Priyatama dan Apriansah (2010) bahwa peningkatan penggunaan *e-money* di Indonesia mempunyai dampak terhadap laju inflasi. Studi lain yang dilakukan Kamnar (2014) di berbagai negara Eropa juga menyatakan bahwa dengan penggunaan *e-money*, transaksi relatif lebih murah dan memungkinkan peningkatan jumlah transaksi serta peningkatan kecepatan uang. Arewa dan Nwakanma (2013) menyatakan bahwa penambahan penawaran uang mengakibatkan peningkatan pada kecepatan perputaran uang di Nigeria. Peredaran uang dapat mempengaruhi inflasi ketika kecepatan perputaran uang tinggi. Pernyataan ini juga dikemukakan Priyatama dan Apriansah (2010) bahwa kecepatan perputaran uang adalah salah satu variabel yang menentukan inflasi.

2.2.2 Pengaruh Nilai Tukar terhadap Inflasi

Teori yang menerangkan hubungan antara nilai tukar dan tingkat inflasi diantara dua negara dengan kurs kedua Negara tersebut dengan teori paritas daya

beli (*purchasing power parity*-PPP). Dalam teori paritas daya beli ini dikatakan bahwa nilai tukar antara dua negara seharusnya sama dengan rasio dari tingkat harga di kedua negara tersebut. Menurut Madura (2009), keseimbangan nilai tukar akan menyesuaikan dengan besaran perbedaan tingkat inflasi diantara dua negara. Hal ini mengakibatkan daya beli konsumen untuk membeli produk-produk domestik akan sama dengan daya beli mereka untuk membeli produk-produk luar negeri. Dengan kata lain, jatuhnya daya beli domestik pada suatu mata uang (meningkatnya tingkat harga domestik atau meningkatnya inflasi) akan diikuti oleh depresiasi pada mata uang negara tersebut di pasar uang luar negeri. Namun, jika yang terjadi adalah sebaliknya yaitu daya beli domestik mengalami kenaikan (tingkat inflasi turun/terjadi deflasi) maka akan diikuti pula oleh apresiasi pada mata uangnya. Berdasarkan teori ini maka dapat dikatakan nilai tukar berpengaruh terhadap inflasi.

Melemahnya nilai tukar rupiah menjadikan harga barang-barang impor meningkat dikarenakan dibutuhkan jumlah rupiah yang lebih banyak untuk mendapatkan barang-barang impor tersebut, demikian pula halnya dengan barang-barang dengan bahan baku produksi yang diimpor. Hal ini juga akan menaikkan harga produksi dalam negeri yang dapat berujung pada terjadinya inflasi. Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing juga mengakitbatkan meningkatnya nilai ekspor. Harga barang domestik yang lebih murah menarik minat pihak luar negeri untuk menambah jumlah permintaan akan barangnya sehingga perlahan-lahan harga akan naik dan menyebabkan inflasi.

Selain hubungan langsung, dikenal juga hubungan tidak langsung antara nilai tukar dengan harga. Hubungan tidak langsung nilai tukar dan harga ditransmisikan melalui permintaan domestik dan permintaan eksternal bersih atau ekspor dan impor. Mekanisme transmisi permintaan domestik dapat terjadi melalui perubahan harga relatif antara harga barang domestik dengan harga barang

impor. Kenaikan harga barang impor relatif terhadap harga barang di dalam negeri akibat depresiasi mengakibatkan kecenderungan masyarakat untuk membeli lebih banyak barang di dalam negeri. Kenaikan permintaan tersebut dapat mendorong peningkatan harga-harga barang dalam negeri. Sementara itu, transmisi tidak langsung melalui permintaan ekternal bersih terjadi melalui mekanisme perubahan harga barang-barang impor dan ekspor. Devaluasi nilai tukar mengakibatkan harga barang impor lebih mahal dan harga barang ekspor lebih murah. Kenaikan harga barang impor dapat mendorong terjadinya penurunan jumlah barang impor, sementara penurunan harga barang ekspor dapat meningkatkan ekspor. Secara keseluruhan kedua faktor ini akan meningkatkan permintaan eksternal bersih dan pada lanjutannya meningkatkan total permintaan agregat dan pada akhirnya meningkatkan laju inflasi (Simorangkir dan Suseno, 2004).

Perubahan nilai tukar ini perlu dicermati lebih seksama bagaimana kejutan nilai tukar akan mempengaruhi perekonomian dan inflasi. Perubahan nilai tukar ini tentunya akan berimplikasi terhadap karakteristik fluktuasi nilai tukar dan pengaruhnya terhadap perekonomian terbuka. Rupiah mendapatkan tekanan tekanan depresiatif yang sangat besar diawali dengan krisis nilai tukar. Nilai tukar rupiah secara simultan mendapat tekanan yang cukup berat karena besarnya *capital outflow* akibat hilangnya kepercayaan investor asing terhadap prospek perekonomian Indonesia.

2.2.3 Pengaruh Suku Bunga Acuan terhadap Inflasi

Menurut teori Hicks, tinggi rendahnya tingkat bunga ditentukan oleh faktor-faktor seperti tabungan, investasi, jumlah uang tunai dan jumlah uang beredar. Hal ini dapat digambarkan melalui fungsi gabungan investasi (I) dan tabungan (S) dengan fungsi gabungan liquidity preferance (L) dan money supply (M). Jika kurvanya digabungkan maka akan tercipta keseimbangan lewat perpotongan kurva yang merupakan tingkat bunga. Hicks mengemukakan teorinya bahwa suku

bunga berada dalam keseimbangan pada suatu perekonomian apabila suku bunga acuan ini memenuhi keseimbangan sektor moneter dan sektor rill. Jadi uang dapat meningkatkan produktivitas sehingga orang ingin membayar bunga.

Saat ini Bank Indonesia menggunakan suku bunga acuan sebagai salah satu instrumen untuk mengedalikan inflasi. Apabila inflasi dirasakan cukup tinggi maka Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga untuk meredam kenaikan inflasi. Perubahan suku bunga acuan akan memberikan pengaruh bagi pasar modal dan pasar keuangan. Apabila tingkat suku bunga acuan naik maka akan meningkatkan beban bunga. Perusahaan yang mempunyai *leverage* yang tinggi akan mendapatkan dampak yang sangat berat terhadap kenaikan tingkat suku bunga acuan. Kenaikan tingkat suku bunga acuan ini dapat mengurangi profitabilitas perusahaan sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap harga saham perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Yodiatmaja (2012:3) perubahan suku bunga acuan akan mempengaruhi beberapa variabel makroekonomi yang kemudian diteruskan kepada inflasi. Perubahan berupa peningkatan level suku bunga acuan bertujuan untuk mengurangi laju aktifitas ekonomi yang mampu memicu inflasi. Pada saat level suku bunga acuan naik maka suku bunga kredit dan deposito pun akan mengalami kenaikan. Ketika suku bunga deposito naik, masyarakat akan cenderung menyimpan uangnya di bank dan jumlah uang yang beredar berkurang. Pada suku bunga kredit, kenaikan suku bunga akan merangsang para pelaku usaha untuk mengurangi investasinya karena biaya modal semakin tinggi. Hal demikianlah yang meredam aktivitas ekonomi dan pada akhirnya mengurangi tekanan inflasi.

Perubahan suku bunga acuan mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan.Apabila perekonomian sedang mengalami kelesuan, Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif melalui

penurunan suku bunga untuk mendorong aktifitas ekonomi. Penurunan suku bunga acuan menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan akan kredit dari perusahaan dan rumah tangga akan meningkat. Penurunan suku bunga kredit juga akan menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. Ini semua akan meningkatkan aktifitas konsumsi dan investasi sehingga aktifitas perekonomian semakin bergairah. Sebaliknya, apabila tekanan inflasi mengalami kenaikan, Bank Indonesia merespon dengan menaikkan suku bunga BI Rate untuk mengerem aktifitas perekonomian yang terlalu cepat sehingga mengurangi tekanan inflasi (Bank Indonesia, 2013).

2.3 Penelitian Terdahulu

Ady (2016), dimana *e-money* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap inflasi. Probabilitas t- hitung variabel *e-money* yang lebih besar dari tingkat signifikansi α menunjukkan bahwa variabel *e-money* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap inflasi. Selain itu juga *e-money* tidak dapat mempengaruhi inflasi secara langsung. Penggunaan *e-money* akan mempengaruhi JUB kemudian akan berpengaruh terhadap laju inflasi. Pembayaran dengan *e-money* mempunyai sifat yang praktis dan cepat sehingga penggunaan *e-money* akan meningkatkan kecepatan perputaran uang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Priyatama dan Apriansah (2010). Penyebaran *e- money* cenderung masih perlahan dan belum mempunyai peran yang besar dalam perekonomian Indonesia meskipun begitu berdasarkan pendekatan keseimbangan uang yang sesungguhya, keduanya menyatakan bahwa penggunaan *e-money* mempunyai dampak pada kecepatan perputaran uang.

Sutawijaya dan Zulfahmi (2012) menyatakan bahwa suku bunga, Jumlah Uang Beredar, investasi, dan nilai tukar rupiah secara bersama-sama sangat berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia. Secara parsial faktor tingkat suku bunga (SB) mempunyai pengaruh yang positif terhadap variasi inflasi (INF). Variabel jumlah uang beredar (JUB) menunjukkan pengaruh yang positif terhadap variasi inflasi (INF) di Indonesia. Berdasarkan hasil estimasi, Jumlah investasi (INV) mempunyai tanda koefisien regresi yang negatif terhadap inflasi (INF). Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (NT) memberikan pengaruh yang positif terhadap inflasi (INF).

Perlambang (2010) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa jumlah uang beredar dan nilai tukar (Rp/USD) tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi, sementara SBI memiliki pengaruh signifikan positif terhadap inflasi.

Penelitian mengenai hubungan variabel-variabel moneter terhadap inflasi sebelumnya dilakukan oleh Amrini, dkk (2014) yang menyatakan bahwa jumlah uang beredar, jumlah uang beredar periode sebelumnya, suku bunga SBI, kurs, dan perekonomian secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Sementara itu, secara parsial jumlah uang beredar berpengaruh signifikan dan positif terhadap inflasi di Indonesia.

Langi, dkk (2014) yang menganalisis pengaruh suku bunga BI, jumlah uang beredar, dan tingkat kurs terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Penelitian tersebut menyimpulkan Suku Bunga BI berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat inflasi di Indonesia sedangkan jumlah uang beredar dan tingkat kurs Rp/US dollar berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat inflasi di Indonesia.

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Inflasi merupakan salah satu permasalahan klasik dalam suatu perekonomian yang dapat mengakibatkan menurunnya pendapatan riil masyarakat yang secara berkelanjutan mempunyai dampak negatif dalam perekonomian makro. Hal tersebut menempatkan *issue* inflasi sebagai indikator yang sangat penting dalam menjaga stabilitas perekonomian.

Bank Indonesia sebagai lembaga yang mengambil kebijakan monter, melihat perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin modern, Bank Indonesia memberikan perizinan bagi perbankan maupun lembaga selain bank untuk menerbitkan Uang Elektronik (*e-money*). Uang elektronik dapat digunakan untuk melakukan transaksi yang memungkinkan Pemiliknya untuk melakukan pembayaran atas sebuah transaksi tanpa menggunakan uang tunai. Penerbitan Uang Elektronik semakin berkembang semenjak tahun terbitnya hingga kini. Perubahan Permintaan Uang diasumsikan memiliki hubungan pada tingkat inflasi di Indonesia.

Nilai tukar juga merupakan salah satu variabel yang menyebabkan inflasi. Apabila nilai tukar melemah akan berakibat pada naiknya harga barang dan jasa. Jika harga barang dan jasa naik secara terus menerus maka akan menyebabkan inflasi.

Perubahan suku bunga acuan akan mempengaruhi beberapa variabel makroekonomi yang kemudian diteruskan kepada inflasi. Perubahan berupa peningkatan level suku bunga acuan bertujuan untuk mengurangi laju aktifitas ekonomi yang mampu memicu inflasi. Pada saat level suku bunga acuan naik maka suku bunga kredit dan deposito pun akan mengalami kenaikan. Ketika suku bunga deposito naik, masyarakat akan cenderung menyimpan uangnya di bank dan jumlah uang yang beredar berkurang. Pada suku bunga kredit, kenaikan suku bunga akan merangsang para pelaku usaha untuk mengurangi investasinya

karena biaya modal semakin tinggi. Hal demikianlah yang meredam aktivitas ekonomi dan pada akhirnya mengurangi tekanan inflasi.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

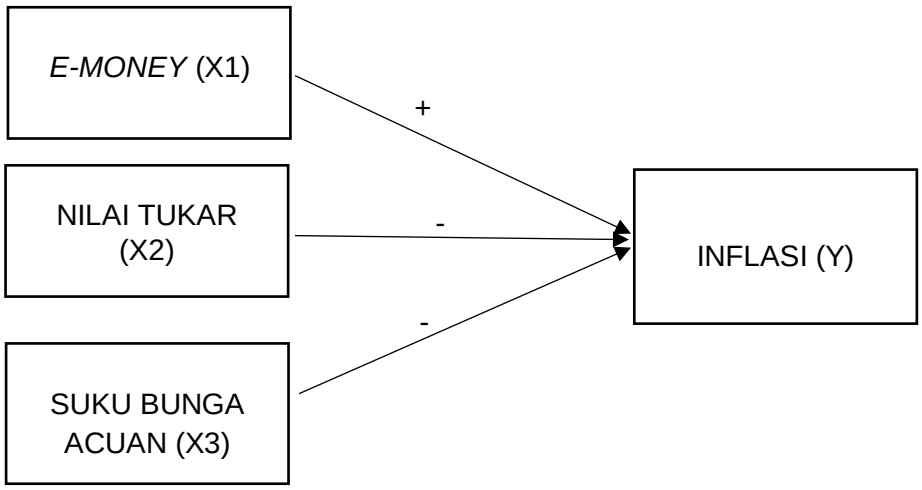

2.5 Hipotesis Penelitian

Dari tinjauan pustaka yang telah diuraikan diatas dan berdasarkan penelitian terdahulu maka hipotesa penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Diduga bahwa *E-Money* berpengaruh positif terhadap inflasi di Indonesia.
2. Diduga bahwa Nilai Tukar berpengaruh negatif terhadap inflasi di Indonesia.
3. Diduga bahwa Suku Bunga Acuan berpengaruh negatif terhadap inflasi di Indonesia.